



## **PENGARUH SISTEM TATA NEGARA TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI DI INDONESIA**

Muhammad Muzhaffar Yahyayasir Iskandar<sup>1</sup>, Tarmudi, S.H., M.H<sup>2</sup>, Dear<sup>3</sup>, Prof. Dr.

H. Sugianto, S.H., M.H.<sup>4</sup>, Nani Nuraeni<sup>5</sup>

Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1</sup>

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta<sup>2</sup>

Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>2</sup>

Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>3</sup>

Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>4</sup>

Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>5</sup>

Email: m.m.yahya02@gmail.com<sup>1</sup>, tarmudi.hukum@gmail.com<sup>2</sup>,

ddear6858@gmail.com,<sup>3</sup> sugianto@@gmail.com<sup>4</sup>, nnuraeni632@gmail.com<sup>5</sup>

### **ABSTRACT**

*This study explores the impact of the state administration system on political and economic stability in Indonesia. The Indonesian state administration system, which is based on principles of democracy, decentralization, and the separation of powers, plays a crucial role in maintaining a balance between political and economic development at both the national and regional levels. The research identifies the major challenges hindering the effectiveness of the state administration system, including issues of coordination among state institutions, corruption, political competition, social inequality, and the centralization of power. These challenges pose a significant threat to Indonesia's political and economic stability. The study concludes that strengthening institutional capacity, improving coordination among institutions, enhancing decentralization policies, and ensuring better governance practices are essential for achieving long-term political and economic stability. The involvement of the public in political processes and the creation of a healthy political environment are also crucial for maintaining democratic stability in the country.*

**Keywords : State administration system, political stability, economic stability, decentralization, governance.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dampak sistem tata negara terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Sistem tata negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan pemisahan kekuasaan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan politik dan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas sistem tata negara, termasuk masalah koordinasi antar lembaga negara, korupsi, persaingan politik, ketimpangan sosial, dan sentralisasi kekuasaan. Tantangan-tantangan ini menjadi ancaman signifikan bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar lembaga, perbaikan kebijakan desentralisasi, dan penerapan tata kelola yang lebih baik sangat penting untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan terciptanya iklim politik yang sehat juga sangat penting untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.



**Kata Kunci: Sistem tata negara, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, desentralisasi, tata kelola.**

## PENDAHULUAN

Stabilitas politik dan ekonomi merupakan fondasi penting bagi kelangsungan hidup suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya, tantangan untuk mewujudkan stabilitas nasional menjadi semakin kompleks. Stabilitas politik yang kuat menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan mendukung proses demokratisasi, sementara stabilitas ekonomi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Farkhan, 2023). Dalam konteks ini, peran sistem tata negara sangat krusial, karena tata negara menentukan struktur pemerintahan, alur pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang ada.

Sistem tata negara di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami perubahan signifikan, khususnya pasca-reformasi tahun 1998. Perubahan ini mencakup desentralisasi, pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penguatan sistem checks and balances (Hidayah et al., 2024). Meskipun reformasi telah membawa berbagai perbaikan, tantangan baru pun muncul, terutama dalam mewujudkan stabilitas politik yang tidak hanya bertumpu pada ketertiban tetapi juga demokrasi yang sehat, serta stabilitas ekonomi yang inklusif. Hubungan antara sistem tata negara dengan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia masih menjadi perdebatan akademis, terutama dalam memahami sejauh mana sistem pemerintahan berpengaruh pada ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh sistem tata negara terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari tata negara yang berkontribusi pada stabilitas atau bahkan menjadi kendala, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keterkaitan antara sistem pemerintahan dan kondisi sosial-ekonomi bangsa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan stabilitas nasional melalui pembaruan dan optimalisasi sistem tata negara yang ada.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memperkuat fondasi pemerintahan yang stabil, efektif, dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pengaruh sistem tata negara terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup analisis dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah terkait tata negara serta stabilitas nasional.

## PEMBAHASAN

### **Sistem Tata Negara di Indonesia**

Sistem tata negara di Indonesia dibentuk berdasarkan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menjadi dasar bagi seluruh aturan dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai fondasi pengaturan kekuasaan dalam



menjalankan pemerintahan, menetapkan peran lembaga negara, dan mendefinisikan mekanisme koordinasi antarlembaga (Hamdi et al., 2024). Pada intinya, sistem tata negara di Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Eksekutif merupakan cabang pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Hamdi et al., 2024). Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, serta mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga eksekutif lainnya. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden memiliki hak prerogatif dalam beberapa keputusan penting, seperti penunjukan menteri, perumusan anggaran negara, dan perjanjian internasional, namun tetap harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan adanya kontrol dan keseimbangan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dalam pemerintahan.

Legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR memiliki peran utama dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR memegang otoritas untuk membuat dan menyetujui undang-undang bersama dengan presiden, sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan kepentingan publik. Selain itu, adanya DPD sebagai wakil daerah dalam proses legislasi bertujuan untuk menampung aspirasi dari berbagai wilayah di Indonesia dan memastikan pemerataan kebijakan nasional. Sementara itu, MPR memiliki fungsi sebagai lembaga tinggi

yang menjaga konstitusi dan mengubah UUD jika diperlukan. Kombinasi fungsi-fungsi ini menciptakan keseimbangan antara kekuatan politik di pusat dan kepentingan daerah.

Yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yang independen, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, sedangkan MK memiliki wewenang khusus dalam meninjau konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, serta memutuskan hasil pemilihan umum. Kedudukan yudikatif sebagai lembaga independen merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dari cabang eksekutif dan legislatif. Peran yudikatif yang kuat ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas hukum yang menjadi fondasi bagi stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.

Setelah reformasi 1998, sistem tata negara Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal desentralisasi dan penguatan checks and balances. Desentralisasi kekuasaan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi beban pemerintahan pusat. Di sisi lain, checks and balances antara ketiga cabang kekuasaan menjadi lebih kuat, dengan DPR memiliki peran lebih besar dalam mengawasi pemerintah, MK diberi wewenang lebih luas dalam menjaga konstitusi, dan pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Perkembangan sistem tata negara ini mencerminkan upaya Indonesia dalam



menciptakan tata pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan inklusif. Struktur tata negara yang ada bukan hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjaga kepentingan publik. Melalui sistem ini, stabilitas politik diharapkan dapat tercapai melalui penguatan lembaga pemerintahan yang saling mengawasi dan bekerja sama. Di sisi lain, stabilitas ekonomi pun diharapkan tercapai melalui sistem tata negara yang mendukung iklim investasi yang stabil dan kebijakan ekonomi yang berkesinambungan.

## **Pengaruh Sistem Tata Negara Terhadap Stabilitas Politik**

Stabilitas politik adalah kondisi di mana sistem politik dalam sebuah negara berfungsi dengan tertib, dinamis, dan minim konflik yang dapat mengganggu proses pemerintahan. Di Indonesia, stabilitas politik memiliki makna yang lebih kompleks karena negara ini adalah demokrasi yang baru tumbuh kembali sejak Reformasi 1998. Sistem tata negara yang diterapkan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang menjamin stabilitas politik dan mengurangi risiko konflik di dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, sistem tata negara memiliki beberapa pengaruh langsung terhadap stabilitas politik (Ernawan et al., 2024).

Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memungkinkan adanya sistem checks and balances yang efektif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, setiap lembaga negara dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan langsung dari lembaga lain, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi satu

sama lain. Misalnya, presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kekuasaan yang luas dalam membuat kebijakan nasional, tetapi kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan dari DPR, yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Di sisi lain, lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), berperan menjaga agar kebijakan dan undang-undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, pembagian kekuasaan ini mencegah akumulasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otoritarianisme, dan dengan begitu turut menjaga stabilitas politik.

Desentralisasi kekuasaan yang dilakukan pasca-reformasi memiliki peran besar dalam stabilitas politik. Otonomi daerah yang diperkuat memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola urusan lokal, sehingga masyarakat daerah dapat merasa lebih diperhatikan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Desentralisasi ini juga mengurangi ketegangan antara pusat dan daerah, yang sebelumnya sering memicu konflik. Dengan adanya pembagian kewenangan yang lebih merata, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat. Hal ini mendukung stabilitas politik karena masyarakat lokal merasa terwakili dan memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Partisipasi politik yang luas dalam sistem demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh struktur tata negara. Sistem politik yang demokratis memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum yang diadakan secara berkala untuk memilih pemimpin eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi politik ini mencerminkan kepemilikan



masyarakat terhadap pemerintahan dan menjadi mekanisme bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka. Dengan adanya partisipasi ini, stabilitas politik lebih terjaga karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pemerintahan. Pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan fondasi dari demokrasi dan menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Di sisi lain, adanya pemilihan yang adil dan transparan juga meminimalkan konflik politik yang dapat memicu ketegangan sosial.

Namun, meskipun sistem tata negara telah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah konflik antar-lembaga negara yang terkadang muncul akibat interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan masing-masing. Misalnya, terjadi benturan antara DPR dan presiden dalam pembuatan kebijakan yang disebabkan oleh perbedaan agenda politik, yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan. Selain itu, konflik antara pemerintah pusat dan daerah kadang-kadang juga terjadi, terutama jika ada kebijakan nasional yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi lokal di daerah tertentu. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar sistem tata negara dapat berfungsi lebih optimal dalam menciptakan stabilitas politik.

Peran lembaga yudikatif dalam menjaga stabilitas politik juga sangat penting. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi, memiliki otoritas untuk meninjau kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil. Keberadaan lembaga

peradilan yang kuat dan independen menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia, yang pada gilirannya mendukung stabilitas politik. Dengan adanya sistem hukum yang adil dan tidak memihak, potensi konflik politik yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu dapat diredam melalui jalur hukum yang resmi.

Pengaruh sistem tata negara terhadap stabilitas politik di Indonesia sangat signifikan, terutama melalui penerapan checks and balances, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi masyarakat (Majid & Raida, 2024). Sistem ini memungkinkan adanya keseimbangan kekuasaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, yang merupakan prasyarat untuk menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang. Namun, peningkatan efektivitas sistem tata negara dalam menjaga stabilitas politik juga membutuhkan penguatan koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum yang konsisten.

## **Pengaruh Sistem Tata Negara Terhadap Stabilitas Ekonomi**

Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara berjalan dengan pertumbuhan yang berkesinambungan, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah. Di Indonesia, pencapaian stabilitas ekonomi sangat bergantung pada peran berbagai lembaga negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang. Sistem tata negara yang diterapkan di Indonesia, yang mengatur pembagian kekuasaan serta koordinasi antarlembaga negara, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi nasional. Struktur pemerintahan, peran lembaga ekonomi, serta hubungan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam mewujudkan



stabilitas ekonomi tersebut (Kurnia et al., 2024).

Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem tata negara. Kebijakan fiskal, yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pengeluaran negara, berada di bawah wewenang pemerintah dan disahkan melalui proses legislasi di DPR. Melalui koordinasi ini, pemerintah dapat mengelola anggaran secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Misalnya, dalam kondisi krisis ekonomi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal untuk mendukung perekonomian, yang harus disetujui DPR. Hal ini menunjukkan bahwa tata negara yang baik memungkinkan adanya koordinasi yang tepat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter, di sisi lain, berada di bawah kendali Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral. Sesuai dengan peran independennya, BI memiliki mandat untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yang meliputi pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Independensi BI yang diatur oleh undang-undang mencerminkan pentingnya sistem tata negara dalam memberikan kebebasan bagi lembaga keuangan negara untuk mengambil kebijakan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar, BI berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena stabilitas harga adalah faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menarik investasi.

Hubungan antarlembaga ekonomi dalam sistem tata negara juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Selain BI, terdapat kementerian dan lembaga yang berperan dalam perumusan

kebijakan ekonomi, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap kementerian tersebut memiliki fungsi yang spesifik, tetapi mereka perlu berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang saling mendukung. Misalnya, Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, sedangkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor industri dan perdagangan yang menjadi motor penggerak ekonomi. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan ekonomi berpotensi tumpang tindih atau tidak sinergis, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, sistem tata negara yang memungkinkan koordinasi yang solid antarlembaga ekonomi dapat mendukung terciptanya kebijakan ekonomi yang harmonis dan terarah.

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem tata negara Indonesia juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi di wilayah mereka masing-masing, termasuk dalam bidang investasi dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan kondisi lokal, sehingga mampu mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga memerlukan pengawasan dan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat agar kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional. Jika pemerintah daerah dan pusat tidak berkoordinasi dengan baik, desentralisasi justru bisa menghambat stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, sistem



tata negara yang efektif harus mampu mengatur hubungan antara pusat dan daerah dengan baik, sehingga kebijakan daerah dapat mendukung visi ekonomi nasional.

Selain itu, peran lembaga peradilan dalam menjaga kepastian hukum juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi. Sistem tata negara Indonesia menjamin adanya lembaga peradilan yang independen, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan kepastian hukum di bidang ekonomi. Kepastian hukum sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi, baik lokal maupun internasional, dalam berinvestasi di Indonesia. Tanpa kepastian hukum, investor mungkin ragu untuk menanamkan modal mereka, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan demikian, peran lembaga yudikatif yang kuat dan independen menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menangani sengketa bisnis dan memastikan bahwa kontrak serta perjanjian diakui dan dilindungi secara hukum.

Namun, meskipun sistem tata negara telah banyak mendukung terciptanya stabilitas ekonomi, beberapa tantangan masih perlu dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah inkonsistensi kebijakan ekonomi akibat perubahan kebijakan yang sering terjadi, terutama ketika kepentingan politik mempengaruhi proses legislasi dan eksekutif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas ekonomi. Selain itu, faktor korupsi dalam lembaga pemerintahan juga masih menjadi masalah yang harus diatasi. Korupsi dapat menghambat implementasi kebijakan ekonomi yang efektif, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya,

dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sistem tata negara di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas ekonomi melalui peran berbagai lembaga ekonomi dan hubungan koordinatif antarlembaga. Tata negara yang efektif memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan sumber daya daerah dapat berjalan harmonis, sehingga mendukung terciptanya stabilitas ekonomi. Meskipun tantangan masih ada, penguatan sistem tata negara yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik akan semakin mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.

## **Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Stabilitas Politik dan Ekonomi**

Peran pemerintah pusat dan daerah dalam sistem tata negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan ekonomi yang ada di tingkat nasional dan lokal. Setelah era reformasi 1998, Indonesia melakukan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dengan memberlakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal, namun juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga tercapai stabilitas politik dan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat dan daerah saling terkait dan saling melengkapi dalam membentuk kestabilan yang diinginkan.

Pemerintah pusat di Indonesia memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan bersama, seperti



kebijakan ekonomi makro, pertahanan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Triadi et al., 2024). Sebagai contoh, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menetapkan anggaran negara dan kebijakan fiskal yang memengaruhi seluruh sektor perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, seperti kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan politik luar negeri, harus dirumuskan dengan mempertimbangkan stabilitas politik dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kerangka besar yang memberikan arah bagi seluruh negara, termasuk dalam hal peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun, dalam sistem tata negara Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal mereka. Sebagai contoh, di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, pemerintah daerah mungkin lebih fokus pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, daerah yang memiliki karakteristik budaya atau sosial tertentu mungkin mengembangkan kebijakan yang memperkuat identitas budaya lokal dan mempromosikan pariwisata. Kewenangan

ini penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi spesifik yang ada di wilayahnya.

Namun, dalam mengelola otonomi ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi, mereka tetap harus mematuhi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi disintegrasi dalam kebijakan nasional. Sebagai contoh, dalam hal kebijakan fiskal dan anggaran, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), mereka tetap harus mengikuti kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan adanya keselarasan dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Begitu juga dengan pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan energi, yang sering kali membutuhkan koordinasi antara pusat dan daerah agar tercapai pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Ketegangan yang muncul antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika kebijakan pusat dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan atau karakteristik daerah tertentu, bisa menjadi faktor yang mengganggu stabilitas politik. Misalnya, kebijakan pusat yang mengurangi alokasi dana untuk daerah atau kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal bisa menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial atau politik. Di beberapa daerah, ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat bisa memunculkan gerakan separatisme atau tuntutan lebih besar atas otonomi daerah, yang bisa mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk menjaga komunikasi yang





baik dengan pemerintah daerah dan mengakomodasi perbedaan kebutuhan lokal dalam kerangka kebijakan nasional.

Selain itu, pengelolaan pembangunan daerah juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang merata. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah yang berfokus pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan efektif, yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, teknis, maupun manajerial. Di sini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan teknis dan pembiayaan melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) agar daerah-daerah yang lebih miskin dan tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya.

Lebih jauh lagi, keseimbangan antara politik dan ekonomi dalam hubungan pusat dan daerah sangat krusial dalam menjaga stabilitas kedua sektor tersebut. Ketika politik lokal dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum, maka kebijakan ekonomi yang diambil bisa lebih mengutamakan kepentingan kelompok tersebut, yang pada gilirannya akan memperburuk ketimpangan ekonomi dan merusak stabilitas politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas politik dan ekonomi pemerintah daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya dengan bijak dan fokus pada pembangunan yang adil dan merata.

Secara keseluruhan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem tata negara Indonesia sangat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara. Koordinasi yang baik antara kedua pihak akan menciptakan keselarasan dalam kebijakan, yang mendukung terciptanya pembangunan yang merata dan stabilitas politik yang kuat. Oleh karena itu, penguatan sistem tata negara yang mendukung komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan stabil dan sejahtera.

## **Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Sistem Tata Negara yang Efektif untuk Stabilitas Politik dan Ekonomi**

Meskipun sistem tata negara Indonesia telah diatur sedemikian rupa untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dan ekonomi, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang sering kali menghalangi efektivitas penerapannya. Tantangan ini berakar dari berbagai aspek, baik itu kelembagaan, sosial, politik, maupun ekonomi, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan konsistensi kebijakan yang dijalankan (Basit & Haryono, 2021). Penerapan sistem tata negara yang efektif untuk mencapai stabilitas tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kemauan politik, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai demokrasi dan rule of law.

Tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antar lembaga negara yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam sistem tata negara yang menganut prinsip checks and balances, lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya bekerja saling mengawasi dan mendukung untuk



menjaga kestabilan negara (Nabila et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan atau bahkan persaingan antarlembaga yang memengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Misalnya, ketidaksepakatan antara pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) sering kali menghambat pencapaian kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis atau permasalahan ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan sistem tata negara yang efektif membutuhkan adanya komunikasi yang lebih baik, pemahaman terhadap kewenangan masing-masing lembaga, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga.

Masalah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat juga menjadi hambatan. Meskipun Indonesia telah melaksanakan desentralisasi sejak reformasi 1998, dalam beberapa aspek masih terlihat adanya kecenderungan untuk mempertahankan pengaruh besar di tangan pemerintah pusat. Hal ini terutama terkait dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pusat. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah merasa bahwa otonomi yang diberikan tidak cukup untuk mengelola potensi daerah secara maksimal. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah ini sering kali menyebabkan ketegangan, terutama ketika kebijakan pusat tidak mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan daerah. Untuk itu, desentralisasi yang lebih baik, disertai dengan peningkatan kapasitas dan otonomi daerah dalam pengambilan keputusan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih relevan dengan kondisi lokal, namun tetap mendukung stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Masalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien menjadi tantangan besar dalam penerapan sistem tata negara yang efektif. Korupsi masih menjadi salah satu isu utama yang menghambat implementasi kebijakan secara efisien dan merata di seluruh Indonesia. Dalam konteks pemerintahan, korupsi dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, yang pada gilirannya akan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi dan politik. Birokrasi yang lambat dan tidak transparan juga sering kali memperburuk situasi ini, menghambat implementasi kebijakan yang cepat dan tepat. Penanggulangan korupsi memerlukan sistem yang lebih ketat dalam pengawasan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pendidikan anti-korupsi yang lebih intensif di kalangan pejabat negara dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi, perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi dan penyederhanaan birokrasi sangat diperlukan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun sistem tata negara telah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, ketimpangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan kemampuan manajerial sering kali menyebabkan disparitas yang besar antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Ketimpangan ini juga diperparah oleh kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas, dengan mereka yang terpinggirkan. Ketika ketimpangan ini tidak ditangani dengan baik, dapat memicu ketidakpuasan, protes sosial, bahkan konflik yang mengancam stabilitas politik dan ekonomi. Oleh



karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemerataan pembangunan sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, dan dengan demikian mendukung terciptanya stabilitas yang lebih kuat di tingkat nasional.

Persaingan politik yang intens juga menjadi hambatan dalam menjaga stabilitas politik. Indonesia, sebagai negara demokratis, memang mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik, namun sering kali persaingan politik yang sengit antara partai politik dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Ketika partai-partai politik lebih fokus pada persaingan untuk mendapatkan kekuasaan ketimbang bekerja sama untuk kepentingan negara, hal ini dapat menghambat pencapaian kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Di sisi lain, ketika partai-partai politik menggunakan identitas agama atau etnis untuk meraih dukungan, hal ini dapat memicu polarisasi sosial dan konflik yang merusak kohesi sosial dan stabilitas politik. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas politik, dibutuhkan iklim politik yang sehat, di mana kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau individu.

Peran masyarakat dan budaya politik juga sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem tata negara yang stabil. Meskipun sistem tata negara Indonesia telah didesain untuk mendukung demokrasi, tantangan terbesar adalah bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memang sesuai dengan aspirasi rakyat. Namun, rendahnya tingkat partisipasi politik, apatisme masyarakat terhadap proses pemilu, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak

politik dan sosial sering kali mengurangi efektivitas sistem politik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan keterlibatan politik sangat diperlukan untuk membangun budaya politik yang matang dan demokratis.

Meskipun sistem tata negara Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi, sejumlah tantangan dan hambatan yang masih ada memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif (Kemhay, 2024). Koordinasi antara lembaga-lembaga negara, pemberantasan korupsi, pengurangan ketimpangan sosial, serta menciptakan iklim politik yang sehat merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa sistem tata negara dapat berfungsi dengan baik. Penerapan sistem tata negara yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kemauan politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem tata negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas politik dan ekonomi. Sistem ini, yang mengadopsi prinsip demokrasi, desentralisasi, dan checks and balances, memungkinkan terjalinnya hubungan yang saling mengawasi antar lembaga negara serta memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Namun, penerapan sistem tata negara yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan antara pusat dan daerah, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, korupsi, ketimpangan sosial, dan persaingan politik yang intens. Untuk itu, diperlukan



upaya yang lebih serius dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperbaiki birokrasi, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antar daerah.

## SARAN DAN PENUTUP

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem tata negara, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan keberlanjutan program-program desentralisasi yang adil, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan agar dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis. Peningkatan kapasitas politik, ekonomi, dan sosial di seluruh lapisan masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik di Indonesia.

## REFERENSI

- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220–237.
- Ernawan, A. C. D., Utomo, A. R. D., Hannaningdyah, R. A., & Asmana, N. A. P. (2024). Memelihara Stabilitas dan Keadilan melalui Keseimbangan Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 683–692.
- Farkhan, M. (2023). Analisis Keterkaitan Antara Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi. *Literacy Notes*, 1(2).
- Hamdi, M. N. R., Kumoro, M. D. S., Aritonang, C. D., & Triadi, I. (2024). Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23435–23441.
- Hidayah, N., Az-Jahra, S., Amanda, A., & Yunitasari, K. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 4–8.
- Kemhay, H. (2024). STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 7(2), 9–22.
- Kurnia, A. D., Zuroida, M., Ikhsaniyah, S. N., Ebensher, Y. K., & Puspita, A. M. I. (2024). Peran Politik Dalam Dinamika Ekonomi: Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 222–228.
- Majid, A., & Raida, R. (2024). REFORMASI KONSTITUSI DAN STABILITAS POLITIK: DAMPAK TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN TATA NEGARA. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 6(2), 11–20.
- Nabila, A., Novita, A., Torriq, E., & Natalie, N. (2024). Tantangan dan Kontroversi Konstitusi dalam Konteks Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 234–246.
- Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., &



Harahap, A. N. M. (2024).  
Implementasi Prinsip-Prinsip  
Demokrasi dalam Sistem Hukum  
Tata Negara Indonesia. *LANCAH:  
Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2), 420–  
428.